

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG
MERUSAK TERUMBU KARANG DI ALUR LAUT KEPULAUAN
INDONESIA**

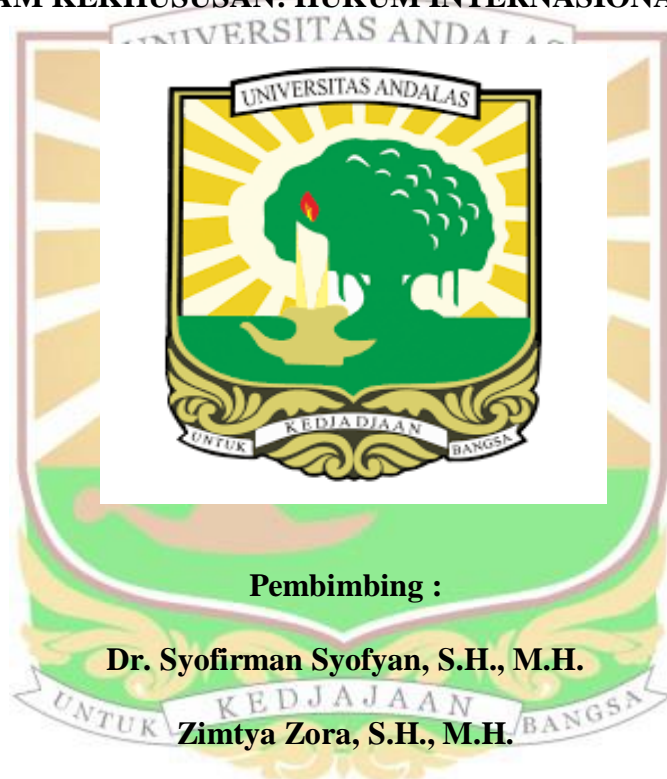
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MARTIN NOPRIADI SITUMEANG
2010117014

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing :

Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.

Zimtya Zora, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2024

**LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGN VESSELS THAT DAMAGE
CORAL REEFS IN THE INDONESIAN ARCHIPELAGO SEA ROUTE**
(Martin Nopriadi Situmeang, 160 Pages, Faculty of Law, Andalas University, 2023)

ABSTRACT

Indonesia is the largest archipelagic country with an ocean area of 3.25 million Km², thus making Indonesia have great potential from the ocean that can be utilized for the prosperity of its people. Seeing such a large ocean area does not rule out the possibility of violating the law as well as pollution and destruction of the marine environment, one of which is the destruction of coral reefs caused by ship shipping activities. Currently, coral reef destruction has often occurred in Indonesian waters, especially in the Indonesian Archipelago Sea Route. The case of the CV Caledonian Sky shipwreck in the Raja Ampat Islands in 2017 resulted in the destruction of 18,882 m² of coral reefs, but until now this case has not received a permanent settlement and decision. Therefore, this research will focus on three things. First, how is law enforcement against foreign vessels that damage coral reefs in the Indonesian Archipelago Sea Route (ALKI)? Second, what efforts have been made by the Government of Indonesia in preventing damage to coral reefs by foreign vessels in the Indonesian Archipelago Sea Route (ALKI)? and Third, what are the obstacles faced by the Government of Indonesia in preventing damage to coral reefs by foreign vessels in the Indonesian Archipelago Sea Route (ALKI). To answer the focus of this research, the author uses empirical research methods by examining and analyzing through interviews as primary data and literature studies (library search) as secondary data. The results of the research conducted concluded that Indonesia has carried out law enforcement against foreign ships that damage coral reefs in ALKI including, out-of-court dispute resolution efforts and dispute resolution through the courts. In addition to law enforcement efforts, the Government of Indonesia and related agencies have also made efforts to prevent the destruction of coral reefs caused by foreign vessels, such as the use of Vessel Traffic Service (VTS), the application of the Traffic Separation Scheme, the creation of more effective and strict laws and regulations, the implementation of security operations and following the annual session of the International Maritime Organization (IMO). Although there are still obstacles in preventing the destruction of coral reefs.

Keywords: Law Enforcement, Marine, Foreign Vessels, Coral Reefs, ALKI



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MERUSAK TERUMBU KARANG DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA

(Martin Nopriadi Situmeang, 160 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023)

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan luas lautan sebesar 3,25 juta Km², sehingga menjadikan Indonesia memiliki potensi besar dari lautan yang dapat dimanfaatkan demi kemakmuran masyarakatnya. Melihat luasan lautan yang begitu besar tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum serta pencemaran dan perusakan lingkungan laut, salah satunya perusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh kegiatan pelayaran kapal. Saat ini sudah sering terjadi perusakan terumbu karang di wilayah Perairan Indonesia terutama pada Alur Laut Kepulauan Indonesia. Kasus kandasnya Kapal CV Caledonian Sky di Kepulauan Raja Ampat pada tahun 2017 mengakibatkan rusaknya terumbu karang seluas 18.882 m², namun sampai saat ini belum adanya kasus ini belum mendapatkan penyelesaian dan keputusan yang tetap. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada tiga hal. Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap kapal asing yang merusak terumbu karang di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)? Kedua, Apakah upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya kerusakan terumbu karang oleh kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)? dan Ketiga, Apakah kendala yang didapat Pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya kerusakan terumbu karang oleh kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)?. Untuk menjawab fokus penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan mengkaji dan menganalisis melalui wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan (*library search*) sebagai data sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa Indonesia telah melakukan penegakan hukum terhadap kapal asing yang merusak terumbu karang di ALKI diantaranya, upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selain melaksanakan upaya penegakan hukum, Pemerintah Indonesia dan Instansi – instansi terkait juga telah melakukan upaya pencegahan perusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh Kapal asing, seperti penggunaan *Vessel Traffic Service (VTS)*, penerapan bagan pemisah Alur Laut Kepulauan (*Traffic Separation Scheme*), pembuatan peraturan perundangan – undangan yang lebih efektif dan ketat, pelaksanaan kegiatan operasi pengamanan dan mengikuti sidang tahunan *International Maritime Organization (IMO)*. Meskipun masih adanya kendala – kendala dalam pencegahan perusakan terumbu karang tersebut.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Laut, Kapal Asing, Terumbu Karang, ALKI